

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	
1. Spesifikasi penelitian	24
2. Metode pendekatan	24
3. Tahap penelitian.....	25
4. Teknik pengumpulan data.....	26
5. Analisis data.....	26
6. Lokasi penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOORDINASI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum di Indonesia	
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana	
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	46
2. Model Sistem Peradilan Pidana	52
3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	67
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Administrasi Negara	
1. Pengertian dan Istilah Hukum Administrasi Negara.....	69

	2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	74
	3. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	78
BAB III	PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH JAWA BARAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU	
	A. Gambaran Umum Institusi Aparat Penegakan Hukum di Indonesia	87
	1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	88
	2. Kejaksaan Republik Indonesia.....	93
	3. Badan Peradilan Republik Indonesia	104
	4. Lembaga Pemasyarakatan.....	111
	5. Advokat atau Penasihat Hukum.....	113
	B. Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Indonesia	126
	C. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Institusi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Jawa Barat ..	139
BAB IV	ANALISIS MENGENAI PELAKSANAAN KOORDINASI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI WILAYAH JAWA BARAT	
	A. Landasan Hukum Terkait Koordinasi Penanganan Perkara Pidana Antar Instansi Lembaga Penegak Hukum.....	143
	B. Pelaksanaan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Jawa Barat Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara	150
	C. Kendala yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Perkara Antar Instansi Penegak Hukum dan Penyelesaiannya	167
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	171
	B. Saran.....	173
	DAFTAR PUSTAKA	175